

**Judul** : Stagnasi Anggaran Kemenpora Bukan Masalah  
**Tanggal** : Kamis, 19 September 2019  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 11

## Stagnasi Anggaran Kemenpora Bukan Masalah

● MUHAMMAD IKHAWANUDDIN

JAKARTA – Pengamat olahraga nasional Teddy K Somantri memberikan beberapa catatan terhadap anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2020 yang tidak naik dari tahun ini. Dia menyampaikan, stagnasi anggaran pemerintahan itu bersifat wajar karena menjelang pergantian susunan kabinet masa kerja 2019-2024.

“Toh, walaupun presidennya tetap, belum tentu Menporanya ikut tetap. Apalagi, ada wacana perubahan menjadi badan, *kan?*” kata Teddy saat diwawancarai *Republika*, Rabu (18/9).

Kemudian, ia menaruh perhatian pada rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Menurut dia, perlu ada kejelasan dari Kemenpora dan DPR terkait alokasi anggaran keolahragaan dengan kaitan pindahnya pusat pemerintahan. “Apakah ini akan dianggarkan tahun depan atau kapan? Belum jelas juga,” ujarnya.

Hal yang terakhir, menurut Teddy, apabila Kemenpora atau badan olahraga punya kewenangan dalam pembinaan prestasi olahraga, perlu diperhatikan pula anggaran penyelenggaraan kejuaraan dan keikutsertaan para atlet Indonesia, baik pada ajang internasional maupun nasional. Sebab, pada 2020, pemerintah memiliki hajatan olahraga bernama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 di Papua yang memerlukan biaya tersendiri.

Sebelumnya, Kemenpora menggelar rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/7). Pertemuan tersebut menyepakati anggaran Kemenpora tidak bertambah.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Abdul Filki Faqih itu membahas Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2020 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran. Imam menyatakan, untuk penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2020 tidak ada kenaikan anggaran sehingga anggaran yang disetujui sebesar Rp 1,7 triliun. Meski jumlahnya tetap, Imam menegaskan akan memaksimalkan anggaran yang sudah ditetapkan.

“Kami akan melanjutkan rekomendasi dari Komisi X DPR terkait arah program untuk pengembangan kepemudaan yang tepat sasaran, seperti pemuda antinarkoba, pemuda jalanan, kesetaraan gender, partisipasi pemuda di daerah sampai persiapan PON 2020. Ini betul-betul menjadi perhatian kami,” kata Imam.

Setelah Imam memberikan paparan, rapat dilanjutkan dengan pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI dan dilanjutkan kesimpulan. Pada kesimpulan tersebut, Komisi X DPR menyetujui Pagu Anggaran Kemenpora RI pada RAPBN TA 2020 (definitif) sebesar Rp 1,7 triliun.

Komisi X DPR dan Kemenpora sepakat program-program strategis nasional diklaim bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Hal itu akan dilaksanakan oleh Kemenpora dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2020 yang telah dilakukan.

Namun, di satu sisi, Komisi X DPR menolak pengajuan Rp 16 miliar oleh Kemenpora terkait program peningkatan sarana dan prasarana. DPR hanya setuju menganggarkan rencana pengelolaan keuangan dan kerumahtanggaan Kemenpora sebesar Rp 4 miliar. ■ ed: gilang akbar prambadi